



## Local Religion: Complexity of Challenges and Efforts to Maintain Existence in the Pre-Reformation Era

**Misbahuddin**

*Institut Agama Islam Negeri Ternate*

[misbahuddin@iain-ternate.ac.id](mailto:misbahuddin@iain-ternate.ac.id)

**Salsabilla Usman**

*Institut Agama Islam Negeri Ternate*

[Salsabillausman955@gmail.com](mailto:Salsabillausman955@gmail.com)

|                               |   |                                |
|-------------------------------|---|--------------------------------|
| Submitted:<br>15 Agustus 2024 | Revision Required:<br>20 September 2024 | Published:<br>15 Desember 2024 |
|-------------------------------|---|--------------------------------|

### **Abstrack**

Pre-reformation was a difficult period for groups of Penghayat Kepercayaan/Local Religion in Indonesia. Pressure and marginalization on all fronts become part of their lives. Their options of the pressure they receive were divergent. Despite in general the sources of pressure approximately same, their ways of dealing with those challenges were determine on the quantity and regional condition confined to the intensity and implementation of the opposition. This researched was qualitative, descriptive analytic. The researched method used the Historical Research Method with sociological and anthropological. The results of the research showed that the adaptation options carried out by large groups of Local Religion in communal areas (cities) tend to take place politically and avoid physical clashes. Meanwhile, the large groups but militant in remote areas face physical opposition (group wars with other marginal communities) so that they also react with physical warfare. This situation is another effect of the newly established state which defined to many clashes of understanding in society. On the other hand, a small quantity of Local

Religion in remote areas prefer to the path of peace and spread the teachings secretly. The findings in this research will guide policy makers in understanding the background, development and challenges of believers, each of which has its own uniqueness.

**Keywords:** *local religion, marginalization, existence.*

### **Abstrak**

Pra reformasi merupakan masa yang sulit bagi kelompok penghayat kepercayaan di Indonesia. Tekanan dan marginalisasi di segala lini menjadi bagian dari kehidupan mereka. Opsi adaptasi/tindakan mereka terhadap tekanan yang diterima pun sangat beragam. Meskipun secara umum sumber tekanan kurang lebih sama, cara-cara mereka dalam menghadapi tantangan tersebut sangat bergantung pada kondisi kuantitas dan kewilayahan yang melahirkan intensitas dan implementasi penentangannya. Penelitian ini bersifat kualitatif, deskriptif analitik. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Sejarah dengan pendekatan sosiologi dan antropologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, opsi adaptasi yang dilakukan kelompok besar penghayat kepercayaan di wilayah komunal (kota) cenderung berlangsung secara politis dan menghindari benturan fisik. Semenitara itu, pada kelompok yang berjumlah besar namun militan ke wilayah pelosok mendapat penentangan fisik (perang kelompok dengan komunitas marginal lain) sehingga bereaksi juga dengan kekuatan fisik. Situasi ini sebagai efek lain dari negara yang baru berdiri yang melahirkan banyak benturan paham dalam masyarakat. Di sisi lain, kelompok penghayat kepercayaan dengan kuantitas kecil dan berada di wilayah terpencil lebih memilih jalan damai dan menyebarkan ajaran secara sembunyi-sembunyi. Adapun yang menjadi temuan dalam penelitian ini akan menuntun pengambil kebijakan dalam pemahaman latar belakang, perkembangan, dan tantangan penghayat kepercayaan yang memiliki keunikannya masing-masing.

**Kata Kunci:** *penghayat kepercayaan, marginalisasi, eksistensi.*

### **PENDAHULUAN**

Penghayat Kepercayaan—sebelumnya disebut Aliran Kebatinan—merupakan keniscayaan yang tidak bisa hilang dari identitas bangsa Indonesia, sebab kehadirannya juga mengikuti sejarah manusia nusantara dalam menemukan kekuatan tertinggi yang mengendalikan

semesta. Naluri manusia yang sejak awal keberadaannya mencari-cari identitas dan asal dirinya meyakini bahwa hidupnya sangat bergantung pada kekuatan tertinggi itu. Segala sesuatu yang dianggap mampu menjadi penyalur doa-doa dan harapan pun dijadikan oleh masyarakat masa lampau sebagai sarana penyembahan dan pemujaan. Kebiasaan inilah yang kemudian bertransformasi menjadi sebuah kebudayaan Nusantara dan mengalami pasang surut eksistensinya hingga saat ini. Situasi tersebut mampu bertahan bahkan setelah keyakinan lain datang dan menanamkan pengaruhnya, seperti Hinduisme, Budhisme, Islamisme, hingga Kristenisme. Pengaruh beberapa agama baru memang sangat terasa dalam kehidupan masyarakat Nusantara di masa lalu. Akan tetapi, itu nampaknya hanya berlaku di wilayah-wilayah tertentu, seperti perkotaan, pusat kerajaan, jalur perdagangan, serta wilayah komunal dan interaksional lainnya. Situasi itu tidak terjadi pada wilayah pedalaman yang tidak terjangkau oleh legitimasi tertentu di masanya, kecuali kekuasaan intim yang hanya berlangsung dalam komunitas mereka sendiri. Barulah pada era kemerdekaan Indonesia mereka secara perlahan mulai tersentuh oleh kekuasaan asing dari luar komunitas mereka dan perlahan terintegrasi kedalamnya, baik dalam bentuk utuh, maupun sebagai hasil akulturasi yang melahirkan sinkretisme (Afandi, 2018).

Sesuai data kependudukan, di Indonesia sejauh ini tercatat sebanyak 117.412 jiwa Penghayat Kepercayaan (Kemendagri, 2022). Sejarah eksistensi kelompok mereka memiliki banyak persamaan dari potret kebudayaan yang mengiringi perjalanan bangsa ini. Selain bahwa mereka adalah keyakinan asli para leluhur, mereka terkesan memiliki kesamaan permasalahan dalam hal kesetaraan hidup di negeri ini. Aspek permasalahan yang dimaksud merujuk pada marginalisasi melalui berbagai tekanan dalam berbangsa dan bernegara (Jufri & Mukhlis, 2019). Melalui kajian konvensional dan nonkonvensional, hipotesa tentang marginalisasi Penghayat Kepercayaan dalam sejarah Indonesia menjadi penting ditelusuri secara mendalam. Marginalisasi dan berbagai macam tekanan lainnya akan menciptakan banyak dilema dalam hal kontinuitas kelompok mereka dalam masyarakat. Keberadaan mereka – konteks keindonesiaan – yang meliputi Orde Lama, Orde Baru, hingga Era Reformasi, telah mengalami beragam pengalaman.

Dilema eksistensi merupakan dampak khusus yang dihasilkan oleh setiap tindakan marginalisasi, tidak hanya dari jumlah pengikut, tetapi juga dalam hal regenerasi ajarannya. Di sisi lain, tekanan yang dihadapi oleh mereka sebenarnya mampu menciptakan kekuatan *civil society* yang berpotensi melahirkan eksistensi, sebagaimana pendapat Greg Barton, bahwa kelahiran *civil society* di berbagai negara adalah adanya sentimen masyarakat yang menguat akibat ketertekanan politik, sosial, ekonomi, dan budaya (Barton, 2000). Situasi yang diuraikan sebelumnya memberi penguatan bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan. Selain sebagai jalan penguak sejarah, juga mampu memberi jawaban mengapa dalam situasi dilema dan krisis eksistensi, sebagian besar Penghayat Kepercayaan di Indonesia mampu bertahan melewati zaman. Mereka tentu punya cara-cara tersendiri dalam menjaga keberlangsungan kelompoknya itu. Secara khusus hubungan kausalitas antara tekanan sosial, budaya, dan politis terhadap keberlangsungan penghayat kepercayaan di Indonesia akan menjadi indikator khusus di dalamnya. Adapun aspek-aspek atau indikator tersebut secara spesifik akan ditinjau dari kuantitas kelompok dan kondisi kewilayahannya (ruang penyebaran), sehingga wacana ini dapat memiliki nilai kebaruan yang kuat.

## **METODE**

Penelitian ini bersifat kualitatif, deskriptif analitik. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Sejarah. Adapun Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi, antropologi, dan etnografi. Sumber/data sejarah diambil dari bahan kepustakaan dan didukung oleh data lapangan. Fokus penelitian merujuk pada 3 aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, yaitu Agama Djawa Soenda (Madraisme), To Wani To Lotang, dan Agama Isa/Muhdi Akbar. Klasifikasi ketiganya mewakili dua kriteria, yaitu pengaruh dan pengikut (kuantitas) dan aspek wilayah penyebaran (komunal perkotaan sampai yang terpencil). Pertimbangan ini dilakukan, sebab peneliti berhipotesis bahwa meskipun masing-masing kelompok penghayat kepercayaan memiliki tantangan umum yang kurang lebih sama di masa sebelum reformasi, tapi intensitas dan faktor-faktor khusus di sekitar mereka tentu menentukan cara mereka untuk bersikap dan bertindak dalam mempertahankan diri. Faktor yang dimaksud seperti, iklim politik,

legitimasi organisasi keagamaan, atau masyarakat umum yang berhadapan langsung dengan keberadaan mereka.

Sebagaimana lazimnya penelitian sejarah akan dilakukan dalam 5 tahap, yakni Pemilihan Topik, Heuristik, Verifikasi, Interpretasi, dan Historiografi. Pemilihan Topik dalam penelitian ini didasarkan pada penelusuran dan pendalaman secara konvensional dan nonkonvensional. Pendalaman dilakukan dengan literasi intensif, mengurai berbagai data kepustakaan (buku-buku, jurnal, karya ilmiah), dan penelusuran website untuk menentukan judul penelitian yang tepat. Tahap heuristik kemudian dilakukan untuk mengumpulkan data awal sebanyak mungkin (tertulis dan tidak tertulis), termasuk (khusus) diterapkannya pendekatan etnografi untuk melihat, mengamati, dan merasakan langsung keberadaan salah satu komunitas penghayat kepercayaan. Selanjutnya dilakukan kritik (internal dan eksternal) terhadap data-data tersebut untuk menentukan kelayakannya sebagai sumber sejarah. Interpretasi akan dilakukan dengan teliti sesuai dengan metode, pendekatan, serta kedalaman pengetahuan dan pemahaman peneliti. Tahap akhir, yakni dilakukannya historiografi yang disandarkan pada sistematika penulisan yang terstruktur rapi dan disesuaikan dengan kaidah penulisan karya ilmiah terbaru.

## **PEMBAHASAN**

Keberadaan penghayat kepercayaan kenyataannya telah berbenturan langsung dengan sistem politis, sosial, dan keagamaan di negara yang baru berdiri. Situasi ini tercermin sejak Indonesia mulai melakukan penataan lembaga-lembaga pemerintahan di awal kemerdekaan, secara khusus Dewan Perwakilan Rakyat dari pusat hingga ke daerah-daerah. Kemunculan partai-partai pun turut meramaikan pemenuhan kebutuhan negara tersebut, bahkan tidak sedikit organisasi sosial dan pendidikan bertransformasi menjadi partai politik. Untuk mendapat dukungan yang besar, partai-partai yang ada terus bekerja keras dalam meraup pendukung dan suara rakyat. Salah satu yang juga aktif berpartisipasi adalah kelompok-kelompok keagamaan yang sudah jelas memiliki kekuatan basis pendukung. Pemimpin-pemimpin mistikus di seantero negeri pun akhirnya terlibat dalam persaingan politik, bahkan pada kenyataannya ada yang mampu duduk sebagai anggota DPR RI terpilih. Salah satu fakta yang dapat diambil adalah

terpilihnya Soedjono Prawiro Soedarso dan Soehardjo (pemimpin dan petinggi Penghayat Ngelmu Sedjati) sebagai anggota DPR Pusat Tahun 1955 (Huda, 2017). Setelahnya, tidak sedikit dari anggota penghayat kepercayaan lainnya berbondong-bondong memulai karir politik untuk mengikuti jejak pendahulunya, baik sebagai anggota maupun pendiri partai. Tendensi politik pun mencuat setelah Sarimun Sumowidjoyo (Perkumpulan Suci Rahayu) mengajukan surat pada pemerintah agar dirinya diangkat menjadi wakil golongan mistik dalam pemerintahan. Kekuatan politik tentu akan menjadi salah satu motor pendorong eksistensi mereka dalam negara dan masyarakat yang masih mempertanyakan keberadaan mereka. Kondisi ini memperlihatkan adanya geneologi sederhana tentang aliran kebatinan/penghayat kepercayaan di kancah politik tertinggi negeri dengan lahirnya Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Tahun 1954, hingga Penetapan Presiden No.1/PNPS 1965. Legitimasi, persaingan, dan strategi pemenangan politik dari partai-partai besar tentu saja mampu dan berpotensi memicu lahirnya situasi tersebut.

Merujuk pada argumentasi sebelumnya, lahirnya Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) menjadi bukti awal dari tantangan yang harus dihadapi oleh komunitas penghayat kepercayaan. Departemen Agama RI (didominasi umat Islam) di Tahun 1952 sempat mengeluarkan definisi minimum tentang agama yang harus didasarkan pada keberadaan Nabi, Kitab Suci, dan Pengakuan Internasional. Situasi ini dilatarbelakangi juga oleh kekhawatiran umat Islam terhadap adanya penyimpangan ajaran dan faktor keterlibatan khusus kelompok penghayat kepercayaan dalam PKI (Partai Komunis Indonesia). Akan tetapi, adanya oposisi dari agama Hindu Bali dalam pengkategorisasian itu membuat Departemen Agama akhirnya mengubah kebijakan dengan pembentukan Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat pada tahun 1954 (Sukamto, 2013).

Di lain sisi, sporadisasi politis PKI turut andil dalam setiap tekanan yang dialami oleh para penghayat kepercayaan. Sebagaimana di deskripsikan sebelumnya, bahwa massa penghayat kepercayaan menjadi salah satu lahan partai politik untuk meraup suara dan dukungan. Jika dilihat dari jumlah pengikutnya, tahun 1950-an merupakan periode emas pada perkembangan jumlah penganut penghayat kepercayaan. Tidak hanya para priyai, kaum abangan pun

berbondong-bondong masuk dalam kelompok ini. Tidak heran jika di era Orde Lama cukup banyak massa penghayat kepercayaan yang terafiliasi dalam keanggotaan PKI. Layaknya sebagai ideologi yang menentang agama, stigma (PKI) itu pun disematkan pada penghayat kepercayaan yang sama-sama tidak memiliki agama yang dilegalkan pemerintah. Belakangan, keruntuhan PKI di Indonesia yang diikuti dengan stigmatisasi negatif dari masyarakat telah membuka babak baru marginalisasi sosial pada kelompok penghayat kepercayaan. Terhubungnya mereka dengan PKI yang memiliki ideologi berseberangan dengan Islam telah memperkuat stigma ajaran kepercayaan ini sebagai bagian yang satu dengan komunisme.

Penjelasan awal ini menunjukkan bahwa kehidupan penghayat kepercayaan tidak hanya mendapatkan tekanan dalam aktivitas politik, namun mulai masuk pada ranah sosial, keagamaan, dan unsur kebudayaan lainnya. Pada konteks keindonesiaannya, zaman Orde Lama boleh dibilang secara konstitusional telah menguatkan berbagai bentuk tekanan itu dengan kebijakan-kebijakannya. Situasi ini seolah disempurnakan dengan lahirnya Penetapan Presiden No.1/PNPS 1965. Sebuah aturan tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama yang dalam pemahamannya hanya ada 6 agama yang diakui oleh Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kongfusius (Pradnya, 2021). Tentu saja korban utama dalam ketetapan itu adalah para pengikut kelompok penghayat kepercayaan. Akibatnya, tekanan semakin kuat, mereka dilema dan terpecah, hingga banyak yang terpaksa memeluk agama yang diakui negara. Meskipun memiliki intensitas tekanan yang berbeda-beda, hampir sebagian besar kelompok penghayat kepercayaan telah mengalami uraian awal di atas. Pembedanya tentu saja terletak pada dampak yang dihasilkan (bentuk tantangan) dan cara mereka beradaptasi dengan dampak itu. Untuk memulai analisa dari penelitian ini, maka akan diuraikan beberapa fakta historis keberadaan penghayat kepercayaan, mulai dari bentuk tekanan, dampak, dan bagaimana melihat itu semua dari setiap pendekatan yang digunakan.

Terdapat beberapa data sejarah yang bisa ditampilkan sebagai proses adaptasi yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan dalam menghadapi tantangan, yakni; *pertama*, Agama Djawa Soenda (Madrisme; bernaung dalam Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang).

Penghayat kepercayaan ini sudah terdokumentasikan sejak 1885 atas interaksinya dengan VOC (Fadhil, 2020). Mereka diposisikan peneliti pada kriteria penghayat kepercayaan dalam kemodernan dan komunalitas di wilayah perkotaan.

Paham Agama Djawa Soenda di dasarkan pada pemikiran Madraisme. Inti ajarannya adalah "*Pikukuh Tilu*", yakni menekankan pada kesadaran tinggi akan kodrat manusia (*carra cirri manusa*), kodrat kebangsaan (*carra cirri bangsa*), dan mengabdikan kepada yang seharusnya (*mandep ka ratu raja*). Aliran ini dalam sejarahnya tersebar dari Cigugur hingga ke berbagai wilayah di Jawa Barat. Jika ditelusuri, jauh sebelum kebijakan pemerintahan Ir. Soekarno, keberadaan Agama Djawa Soenda sudah pernah ditentang oleh kepentingan mobilisasi Belanda dan Jepang. Mereka yang merasa sangat kewalahan mengontrol umat Islam mulai mendekati organisasi Islam dan memecah belah mereka yang menolak mobilisasi. Tudingan radikal dan pemeras rakyat pun dilayangkan pada Madrais dan pengikutnya, hingga ia pernah diasingkan dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Namun, karena situasi itu tidak menyurutkan Madrais untuk menyebarkan ajarannya, akhirnya Belanda melegalkan kelompok ini setelah Tahun 1926 (Qodim, 2017). Di masa Jepang, mereka dikhawatirkan menjadi wadah perjuangan rakyat melawan pendudukan Jepang, sehingga mereka sempat dilarang keberadaannya.

Sebagaimana umumnya, Orde Lama turut membuka ruang tekanan bagi perkembangan Agama Djawa Soenda yang baru saja dideklarasikan kembali oleh Tedjabuana (anak Madrais) di Tahun 1951. Tokoh ini memancing sentimen umat Islam akibat tindakannya yang dianggap mempermainkan agama. Sejak Tahun 1951 ia tercatat berulang kali masuk dan keluar dari Agama Islam. Tidak ditemukan alasan khusus atas kasus ini, bisa jadi sikap itu dilakukan sekadar untuk menghindari benturan dengan berbagai kecurigaan di masyarakat. Atau mungkin juga ada kaitan dengan anaknya yang menikah dengan bangsawan beragama Islam bernama Raden Subagiaraharja. Jika ditelusuri lebih jauh, Tedjabuana merupakan salah satu perintis Badan Kongres Kebatinnan Indonesia (BKKI) Tahun 1955 yang berpusat di Semarang. Untuk urusan tersebut, ia bekerjasama dengan rekan-rekannya, seperti Mr. Wongsonegoro, Ramuwisit, O. Romodjati, R. Soekamto, dan R. Kartawinata. Alasan ini

tentu menjadi salah satu bentuk respon kelompok mereka terhadap tekanan politik dan sosial di masyarakat. Mereka membutuhkan sarana gerak yang setara dengan para penentangannya. Akan tetapi, ruang eksistensinya yang berhadapan langsung dan sangat dekat dengan para penentang, akhirnya membuat ia mengalah dan memilih berkeyakinan Katolik. Ia juga menginstruksikan kelompoknya memilih salah satu agama resmi yang diakui negara (Wahab, 2015). Jika dikaitkan dengan faktor keluarganya, diketahui bahwa isteri yang dinikahi sebelum masuk Katolik adalah juga seorang Nasrani.

Kebingungan pilihan beragama yang dipraktikkan oleh Tedjabuana sepertinya murni karena kepentingan tertentu, bukan karena dorongan dan naluri teologis. Dia adalah pemimpin kelompok yang harus tetap kukuh pada paham kepercayaan yang dia anut. Ia memeluk agama Kristen Katolik hanya setelah Agama Djawa Soenda dilarang dan dibubarkan (1964) menjadi salah satu dasar argumentasi ini. Dalam kondisi demikian, ia juga tercatat masih terus aktif memperjuangkan Agama Sunda Djawa agar bisa hidup kembali dalam masyarakat. Negosiasi praktik peribadatan juga senantiasa dilakukannya dengan pihak Katolik, agar kekhasan praktik ibadah lama mereka dapat diakomodir. Gambaran keadaan ini sangat sesuai dengan pengalaman peneliti berinteraksi dengan Penghayat Kepercayaan lain, seperti Agama Isa/Muhdi Akbar di Selayar, Sulawesi Selatan. Mereka (penganut Muhdi Akbar) mengaku bahwa agama resmi yang sejak masa Orde Lama dianut hanyalah payung pelindung ajaran asli mereka, sementara ajaran mereka tetap dijalankan secara rahasia (hasil wawancara dengan Safruddin, 5 April 2023). Dalam situasi tertekan, beberapa penghayat kepercayaan juga memiliki kesamaan dalam melestarikan ajarannya secara rahasia. Sekalipun terdata sebagai penganut Katolik, Tedjabuana dimakamkan secara Madraisme pada saat meninggalnya di tahun 1978.

*Kedua*, Penghayat Kepercayaan To Lotang. Kelompok ini diposisikan oleh peneliti sebagai kelompok penghayat kepercayaan yang berada di tengah-tengah antara ruang perkotaan/kemodernan dan keterpencilan. Secara geografis penganut To Lotang tidak begitu dekat dengan pusat pemerintahan dengan gaya penyebaran mereka yang cukup nomaden. To Lotang adalah kelompok penghayat kepercayaan yang memiliki pokok ajaran kepercayaan pada Tuhan

Yang Maha Esa (*Dewata Seuwae*) dan dewa-dewa lainnya, percaya pada hari akhir dan kehidupan berikutnya (*Lino Paimeng*), meyakini wahyu *Dewata Seuwae*, dan beriman pada kitab suci Lontara. Mereka tersebar di beberapa wilayah Sulawesi Selatan, seperti Wajo, Pare-Pare, dan Sidenreng Rappang (Bahfiarti et al., 2021). Kepercayaan Lokal ini sebenarnya sudah ada jauh sebelum masa kemerdekaan. Namun, popularitasnya mencuat pasca terjadinya benturan paham dan pembantaian yang dilakukan oleh pasukan DI/TII (Darul Islam-Tentara Islam Indonesia) terhadap komunitas mereka. Status DI/TII yang oleh negara kemudian dicap sebagai pemberontak menjadi jalan balas dendam pengikut To Lotang. DI/TII yang melakukan militansi gerakan bawah tanah akibat status mereka, tentu saja akan bertemu langsung dengan kelompok penghayat kepercayaan yang di masa itu berdiaspora ke wilayah minim tekanan (pelosok). Wilayah perkotaan hanya akan menjadi tempat yang mengikis keyakinan akan kuantitas mereka. Situasi inilah yang sekiranya membuat banyak kelompok penghayat kepercayaan (termasuk To Lotang) terlibat benturan fisik dengan DI/TII di lapangan. Di masa itu, kelompok penghayat kepercayaan To Lotang kemudian menjadi sukarelawan TNI mengejar petinggi dan pasukan DI/TII ke pelosok Sulawesi (Nirwana, 2018). Bagai gayung bersambut, stigmatiasi PKI yang telah melekat pada kelompok penghayat kepercayaan di Indonesia menjadi petaka yang berdampak yang luas, tidak terkecuali pada pengikut To Lotang. Akibat keterlibatan langsung mereka menumpas DI/TII, label komunis terhadap penganut To Lotang pun semakin menguat dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Masyarakat muslim semakin beranggapan bahwa penganut To Lotang benar-benar memusuhi ajaran Islam.

Pada konteks ini kita dapat melihat perbedaan khusus terkait dampak tekanan yang diterima oleh penghayat kepercayaan Agama Djawa Soenda dan To Lotang. Meskipun menerima bentuk tekanan yang kurang-lebih sama, Agama Djawa Sunda lebih menekankan usaha eksistensi pada gerakan politik murni, sedangkan kelompok To Lotang justru mencoba bertahan melalui lobi politik, militer, dan perang fisik. Oleh karena mereka mendapatkan tekanan secara fisik, maka respon mereka pun berusaha dilakukan dengan kontak fisik. Sayangnya, siasat menggunakan status DI/TII sebagai pemberontak

dan memerangi mereka bersama TNI hanya berdampak buruk bagi keberadaan kelompoknya. Kenyataannya masyarakat Sulawesi semakin beranggapan bahwa To Lotang adalah bagian utuh dari ideologi komunis yang memusuhi dan melawan Islam.

Tahun 1965 memang merupakan masa dan situasi pelik bagi para penghayat kepercayaan. Keterlibatan khusus mereka dalam PKI kian menjadi boomerang. Tercatat sekitar 37 orang penganut To Lotang tergabung dalam Lekra, sebuah gerakan kiri yang diinisiasi oleh D.N. Aidit dan kawan-kawan pada 1950 (Artika, 2022). Akibatnya, mereka banyak yang ditangkap dan dipenjarakan pasca melemah dan jatuhnya legitimasi PKI di Indonesia. Puncaknya adalah korban jiwa yang harus ditanggung oleh mereka ketika masyarakat Islam Sulawesi Selatan bersama dengan TNI memburu keberadaan mereka atas dasar memberantas ideologi komunis.

*Ketiga*, Muhdi akbar/Agama Isa adalah kelompok penghayat kepercayaan yang muncul dari komunitas masyarakat terpencil, Selayar, Sulawesi Selatan. Penghayat kepercayaan ini diposisikan oleh peneliti dalam kategori kelompok kepercayaan di wilayah terpencil. Tidak banyak data sejarah yang memuat catatannya, hanya beberapa dokumen Belanda yang memberikan penjelasan awal tentang keberadaan penganut kepercayaan ini. Pemimpinnya adalah seorang tokoh lokal bernama Abdul Ghani Daeng Manrapi. Menurut pengikutnya, ajaran dalam kepercayaan ini juga merupakan beberapa bagian dalam Alquran dan penafsirannya kemudian dikonfersi kembali dalam aksara pegon (hasil wawancara dengan Safruddin, 6 April 2023). Hal ini sejalan dengan pengakuan banyak tokoh Muhdi Akbar, bahwa Muhdi Akbar/Agama Isa merupakan hasil akulturasi Islam dan budaya lokal (hasil wawancara dengan Tuan Said Accong, 8 April 2023). Pada umumnya, murid-murid Abdul Gani tidak dapat membaca kitab berhuruf pegon, sehingga dalam perkembangannya ajaran ini diturunkan secara lisan atau ajaran ditulis kembali dalam aksara *lontara* yang berbahasa Makassar. Aksara ini dikenal dengan istilah *tuli-tulisang* dalam komunitas mereka. *Tuli-tulisang* yang dimaksud saat ini sudah tidak ditemukan dan hanya sedikit saja dari kalangan Muhdi Akbar yang masih mengetahuinya.

Tidak berbeda dengan kalangan aristokrat, ulma-ulama lokal juga merasa terancam kehilangan pengaruhnya dalam masyarakat oleh

eksistensi Muhdi Akbar. Kewibawaan mereka terasa dilucuti dan pemahaman lama dikhawatirkan akan ditinggalkan. Bagi pemimpin lokal, langkah-langkah pertahanan legitimasi dan pengaruh tentu harus dilakukan. Perlu diketahui bahwa Selayar adalah wilayah kepulauan yang pada masa itu masih sulit untuk diakses oleh pemerintah provinsi maupun pusat. Situasi ini membuat pemegang kuasa lokal (*kaopuang*) memiliki peran yang sangat dominan dalam menghadapi paham-paham keagamaan baru didaerahnya. Cara awal yang ditempuh cukup sederhana, yaitu membenarkan pendapat dan paham sendiri, kemudian menyalahkan paham baru. Jangankan Muhdi Akbar, awal kehadiran Muhammadiyah di Selayar pun dianggap oleh mereka sebagai aliran atau agama baru (Misbahuddin, 2022b).

Selain ulama tradisional, tekanan terberat yang dihadapi Muhdi Akbar adalah hadirnya gerakan Muhammadiyah (sejak 1918) di Selayar (Misbahuddin, 2022a). Tidak butuh waktu lama bagi Muhammadiyah untuk menunjukkan superioritasnya di Selayar. Paham Muhdi Akbar yang nyatanya mengabaikan syariat tentu merupakan hal yang harus segera diluruskan dalam Islam. Hal inilah yang kemudian membuat keberadaan Muhdi Akbar semakin tertekan. Untuk menghindari konflik, opsi damai ditempuh oleh kelompok Muhdi Akbar dengan menghindari pusat pengaruh *Kaopuang* dan Muhammadiyah. Muhdi Akbar mampu berkembang di Selayar bagian selatan di sebuah perkampungan bernama Bahorea Toa. Wilayah baru ini terletak sekitar 34 KM dari pusat Kota Benteng (pusat pemerintahan Belanda dan Penyebaran Muhammadiyah). Mereka sebisa mungkin menghindari interaksi langsung dengan tekanan kedua kelompok mayor tersebut. Wilayah perkampungan mereka di masa itu terlihat khusus dan tertutup. Mereka bahkan membangun pemukiman sekitar 7 Km dari akses jalan raya yang dibangun pemerintah kolonial. Melalui beberapa data yang ditemukan, sekitar Tahun 1950 Kepercayaan Muhdi Akbar kemudian mencapai puncak perkembangannya dalam bentuk komunitas besar di Binanga Benteng, kurang lebih 1 km dari Bahorea Toa. Di lokasi baru inilah Muhdi Akbar mampu berkembang pesat, memiliki pengikut 2.455 jiwa dengan paham yang mendominasi di sebagian besar masyarakat Selayar Selatan (Najamuddin et al., 2015).

Suksesinya penyebarannya tidak terlepas dari metode propaganda yang kerap dilakukan. berdasarkan adanya surat jawatan kepolisian

bagian Pengawas Aliran Masyarakat (PAM) Selayar, tanggal 28 Februari 1951, berisi tentang propaganda dari perkumpulan *Binanga Benteng* terhadap pasangan suami istri, Jasang dan Mu'mi. Surat tersebut ditandatangani oleh kepala PAM atas nama Ibrahim Mangawing (Armin, 2013). Isi laporan tersebut menyatakan bahwa pengurus perkumpulan Muhdi Akbar (*Binanga Benteng*) di Batangmata telah menyebar informasi palsu, bahwa suatu waktu nanti akan datang pemeriksa agama ke Pulau Selayar. Barangsiapa tidak masuk dalam perkumpulan *Binanga Benteng* (Muhdi Akbar) akan dibunuh. Sebaliknya apabila telah masuk ke perkumpulan tersebut, maka perkumpulan *Binanga Benteng* akan bertanggung jawab atas segala yang akan terjadi padanya. Sejak saat itu, perkumpulan ini secara otomatis selalu dalam pengawasan ketat aparat.

Setelah lahirnya bagian Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Tahun 1954, Penetapan Presiden No.1/PNPS 1965, dan runtuhnya legitimasi PKI di Indonesia, Muhdi Akbar benar-benar berada dalam masa yang sulit. Selain itu, kedigdayaan TNI era Orde Lama benar-benar menjadi faktor utama yang menekan perkembangan kelompok ini. Menurut penuturan Hamansa (Pelaku Sejarah), ia dan kelompoknya digiring ke markas TNI di Selayar untuk diinterogasi secara militer. Mereka ketakutan karena mendapat tekanan dan paksaan untuk memilih salah satu agama yang diakui oleh negara. Suka atau tidak, mereka terpaksa tersebar dan masuk ke dalam 3 agama yakni Islam, Kristen, dan Hindu yang mereka pun tidak paham dengan ajaran agama tersebut (hasil wawancara dengan Hamansa, 29 April 2023). Di masa awalnya penganut Islam dan Kristen sangat dominan, sementara sangat sedikit yang masuk dalam agama Hindu. Pada kasus ini, kelompok kepercayaan yang begitu jauh dengan situasi politik kenegaraan di pusat pemerintahan, mendapat tekanan langsung dari masyarakat dan organisasi keagamaan besar yang lebih dominan dari segi pengikut. Penghayat kepercayaan di wilayah terpencil lebih memilih jalan damai dengan penetrasi ajaran secara diam-diam. Mereka kesulitan mendapat legitimasi yang kuat dari kelompok atau organisasi lain yang bisa mendukung kelompok mereka. Situasi itu sangat menekan mereka, tidak hanya dari segi ajaran, tetapi juga dari aspek kuantitas kelompoknya. Pemerintah lebih berperan pada aspek

“eksekutor” untuk mengakhiri keberadaan mereka dengan penguatan kebijakan dan tindakan langsung melalui kekuatan aparat negara.

## KESIMPULAN

Melalui ketiga peristiwa historis yang telah diuraikan, ada beberapa ikhtisar penting yang perlu diuraikan dalam tulisan ini. *Pertama*, berbagai tantangan yang dialami oleh kelompok penghayat kepercayaan di Indonesia tidak terlepas pada aspek-aspek bersifat umum yang terjadi di pusat pemerintahan. Situasi ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan dan polemik politik sebelum reformasi terjadi. Semua kebijakan pemerintah nyatanya memberikan tekanan dan hambatan bagi perkembangan kelompok penghayat kepercayaan dan pengikutnya. *Kedua*, ada fenomena khusus yang bisa ditemukan dalam kajian ini, bahwa meskipun faktor utama hambatan mereka sama, tetapi bentuk adaptasi mereka terhadap situasi itu cukup memberikan perbedaan. Situasi ini sangat dipengaruhi oleh aspek geografis dan sosiologis tempat kelompok penghayat kepercayaan itu berada. Penghayat kepercayaan Agama Djawa Soenda senantiasa bergerak dan *defensive* dengan mengedepankan konsolidasi politis. Mereka melibatkan diri dalam politik praktis dan keorganisasian dengan tujuan memiliki kekuatan untuk melawan melalui jalur politik. Di lain sisi, akibat tekanan fisik dari DI/TII, kelompok Penghayat kepercayaan To Lotang di Sulawesi Selatan merespon cukup agresif dengan mencoba menghilangkan tantangan terbesar mereka melalui perang fisik. Sayangnya, atas situasi tersebut mereka justru terjebak dalam tekanan militer yang semakin kuat akibat dukungan masyarakat Islam. Sementara itu, dari wilayah terpencil, kelompok penghayat kepercayaan Muhi Akbar/Agama Isa lebih memilih menghindari kontak/konflik fisik dengan para penentangannya. Mereka berkembang melalui propaganda diam-diam dalam masyarakat. Kondisi kelompok, kuantitas pengikut, dan keterbatasan koneksi/akses politis, menjadi faktor utama mereka kesulitan untuk melegitimasi kelompoknya dalam masyarakat. Satu hal yang juga menjadi catatan penting dalam penelitian ini adalah kesamaan mereka yang sempat fakum dari aspek penyebaran ajaran, hingga kemudian era reformasi mulai membuka jalan baru dan keadaan pun perlahan memihak pada mereka.

## REFERENSI

- Afandi, A. (2018). Kepercayaan Animisme-Dinamisme Serta Adaptasi Kebudayaan Hindu-Budha Dengan Kebudayaan Asli Di Pulau Lombok-NTB. *Historis | FKIP UMMat*, 1(1), 2. <https://doi.org/10.31764/historis.v1i1.202>
- Armin, M. (2013). *Tarekat Muhdi Akbar dalam Kehidupan Keberagaman di Selayar: Perbedaan dalam Tinjauan Etika*. UIN Alauddin Makassar.
- Artika, I. W. (2022). The Oppressed Class in Lekra Poems. *Proceedings of the 2nd International Conference on Languages and Arts across Cultures (ICLAAC 2022)*, 149. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/iclaac-22/125978227>
- Bahfiarti, T., Chotimah, I., Iلمي, D. N., & Anggriani. (2021). Komunikasi Keluarga dalam Mentransformasikan Nilai-Nilai Budaya To Lotang di Kabupaten Sidrap. *Jurnal Komunikasi*, 15, 170. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ilkom.v15i2.12419>
- Barton, G. (2000). *Citizenship and Democracy in a Global Era*. Macmillan Press Ltd. & ST. Martin's Press Inc.
- Fadhil, A. (2020). *Peran Komunitas Adat Karuhun Urang (AKUR) terhadap Kerukunan Umat Beragama dalam Masyarakat Multikultural di Desa Cigugur Kuningan 1985-2020*. IAIN Syech Nurjati Cirebon.
- Huda, N. (2017). Konstruksi Ajaran Budaya Perguruan Ilmu Sejati dalam Relasinya dengan Nilai Keislaman. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 17, 30–31.
- Jufri, M., & Mukhlis, M. (2019). Akibat Hukum Pemisahan Hak Beragama dengan Hak Berkepercayaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 274. <https://doi.org/10.31078/jk1624>
- Kemendagri. (2022). *Kemendagri Sosialisasikan Dokumen Kependudukan bagi Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Kotabaru Kalsel*. [Dukcapil.Kemendagri.Go.Id. https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1279/kemendagri-sosialisasikan-dokumen-kependudukan-bagi-penghayat-kepercayaan-di-kabupaten-kotabaru-kalsel](https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1279/kemendagri-sosialisasikan-dokumen-kependudukan-bagi-penghayat-kepercayaan-di-kabupaten-kotabaru-kalsel)
- Misbahuddin. (2022a). Aggressiveness of Muhammadiyah Islamic Education in Selayar (1931-1938). *Al-Qalam*, 28(1), 147–148.

- <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31969/alq.v28i1.1034>  
Misbahuddin. (2022b). *Sang Surya Bersinar di Tanadoang: Gerakan Persyarikatan Muhammadiyah Selayar 1928-1950*. Deepublish.
- Najamuddin, Kasnawi, T., Agustang, A., & Suhaeb, F. (2015). Muhi Akbar: Nursery of Local Multicultural ini Selayar. *International Journal of Academic Research*, 7, 82.  
<https://doi.org/10.7813/2075-4124.2015/7-1/B.14>
- Nirwana, A. (2018). *Local Religion: To Wani Tolotang, Patuntung dan Alu Tudolo di Sulawesi Selatan*. Bahasa dan Sastra Arab.
- Pradnya, I. M. A. S. (2021). Eksistensi Aliran Kepercayaan Nusantara di Era Post Modern. *Proseding Mistisme Nusantara Brahma Widya*, 32.  
<https://stahnmpukuturan.ac.id/jurnal/index.php/brahmawidya/>
- Qodim, H. (2017). Strategi Bertahan Agama Djawa Sunda (ADS) Cigugur. *Kalam*, 11, 342.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/klm.v11i2.1912>
- Sukamto, A. (2013). Ketegangan Antar Kelompok Agama Pada Masa Orde Lama sampai Orde Baru: dari Konflik Perumusan Ideologi Negara sampai Konflik Fisik. *Indonesian Journal of Theology*, 1, 31. <https://doi.org/https://doi.org/10.46567/ijt.v1i1.90>
- Wahab, A. J. (2015). *Harmoni di Negeri Seribu Agama: Membumikan Teologi dan Fikih Kerukunan*. PT. Alex Media Komputindo.